



INSTITUT HARKAT NEGERI

APBN YANG TIDAK SEHAT, KURANG ADIL, TIDAK MANDIRI, DAN TIDAK AMAN

AWALIL RIZKY (KEPALA EKONOM IHN)



RABU , 23 SEPTEMBER 2020



KONDISI TERKINI APBN 2020 DAN RAPBN 2021, SESUAI PERTANYAAN TOPIK DISKUSI “APA KABAR APBN KITA?”

1. APBN sedang *sakit*, bahkan sakit keras.
2. APBN bersifat *tidak mandiri*. Sangat bergantung kepada penambahan utang baru.
3. APBN terindikasi *kurang adil* dari sisi Belanja
4. APBN sedang dalam kondisi *tidak aman*. Daya antisipasi dan mitigasi atas perubahan keadaan fiscal bersifat sangat rendah.



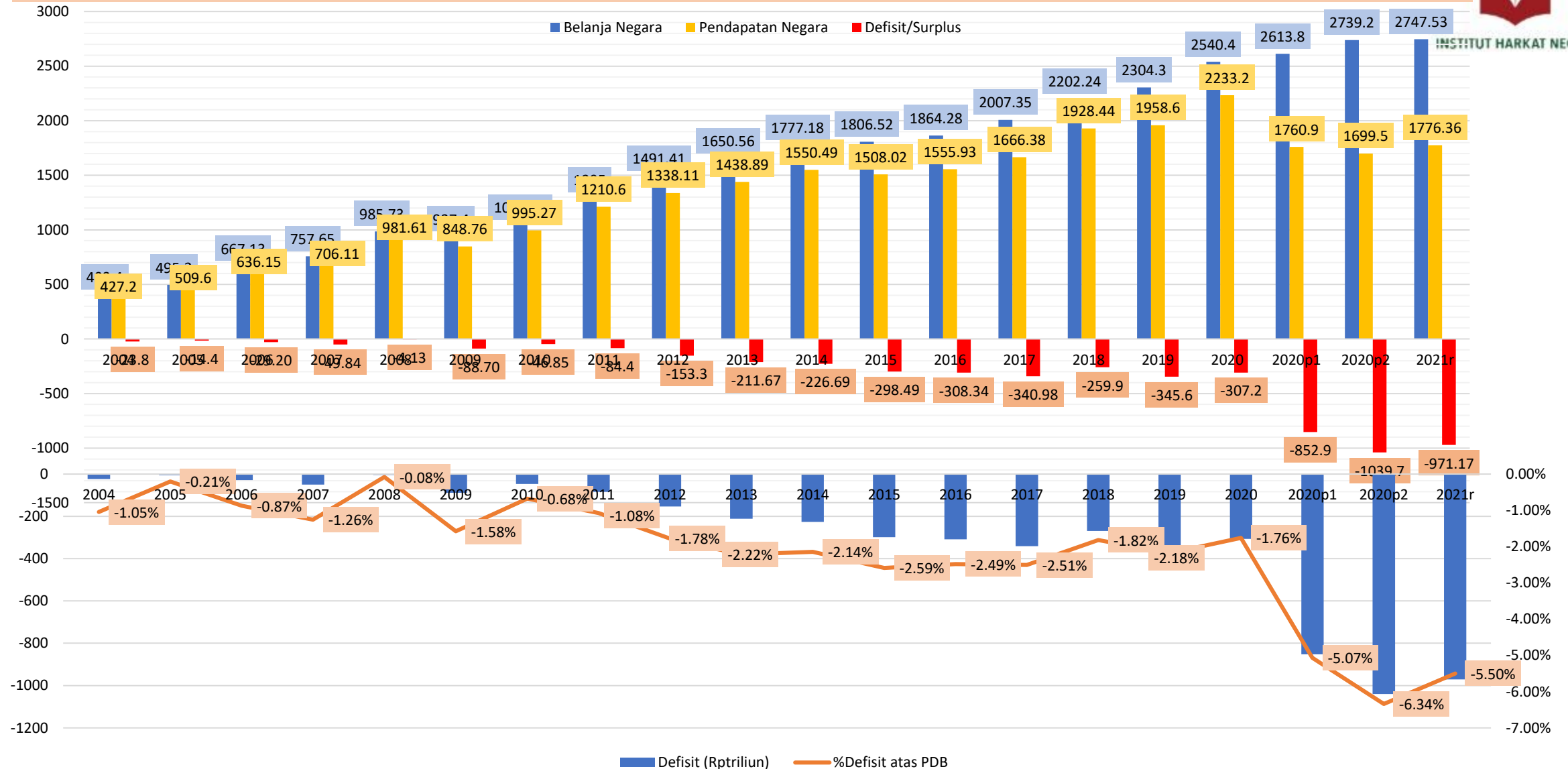
BERLAWANAN DENGAN KLAIM PEMERINTAH TENTANG APBN YANG SEHAT, MANDIRI, DAN AMAN (APBN 2019)

- Pada akhir 2018, Pemerintah memberi keterangan pers yang mengklaim APBN 2019 sebagai "Sehat, Adil, dan Mandiri".
- Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif.
- Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.
- Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang.
- Dalam berbagai kesempatan lainnya menyebut APBN (realisasi) dalam kondisi yang aman

TENTANG TIDAK SEHAT. DEFISIT (BELANJA LEBIH BESAR DARI PENDAPATAN) MAKIN MENINGKAT



INSTITUT HARKAT NEGERI

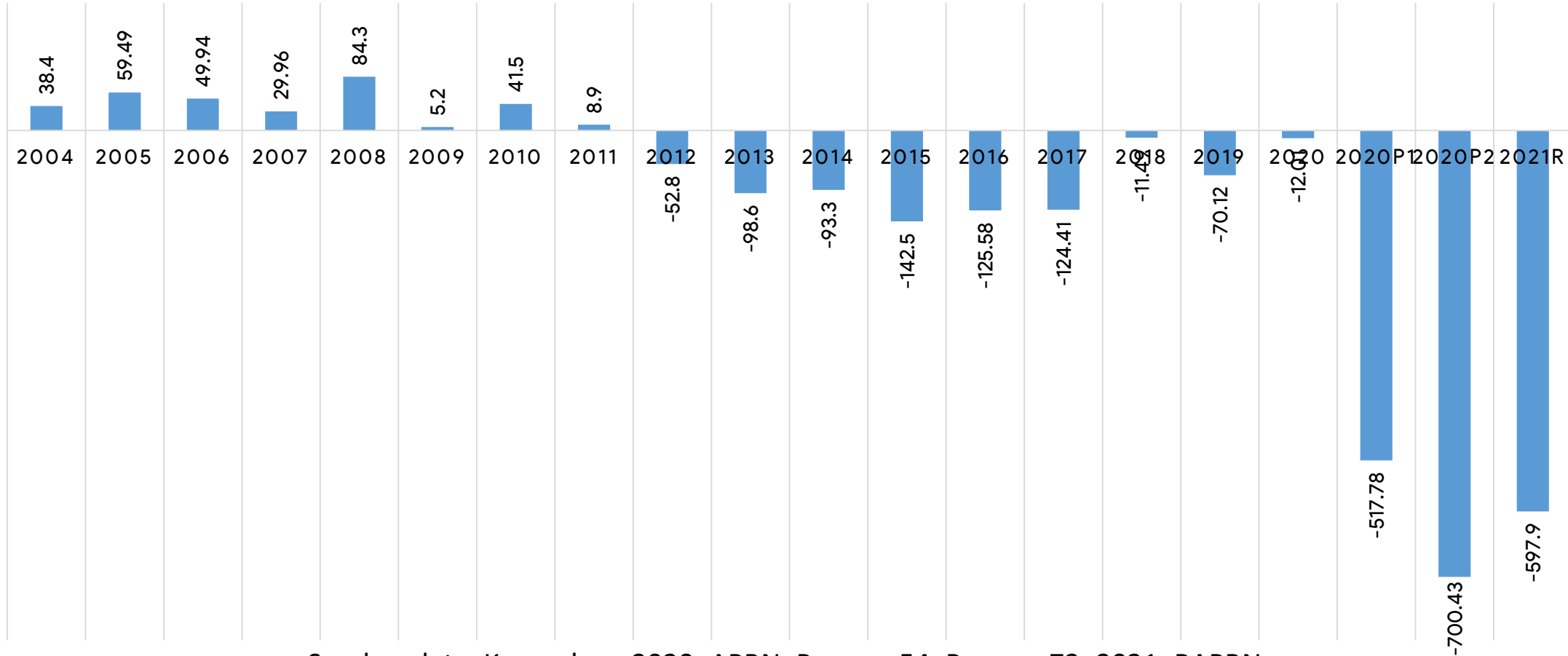


Sumber data: Kemenkeu; 2020: APBN, Perpres 54, Perpres 72; 2021: RAPBN

TENTANG TIDAK SEHAT. Keseimbangan Primer pada perpres 72/2020 sebesar Rp700,43 triliun (4,27% PDB), Tampak makin meningkat, bahkan jika dilihat dari rasio atas PDB



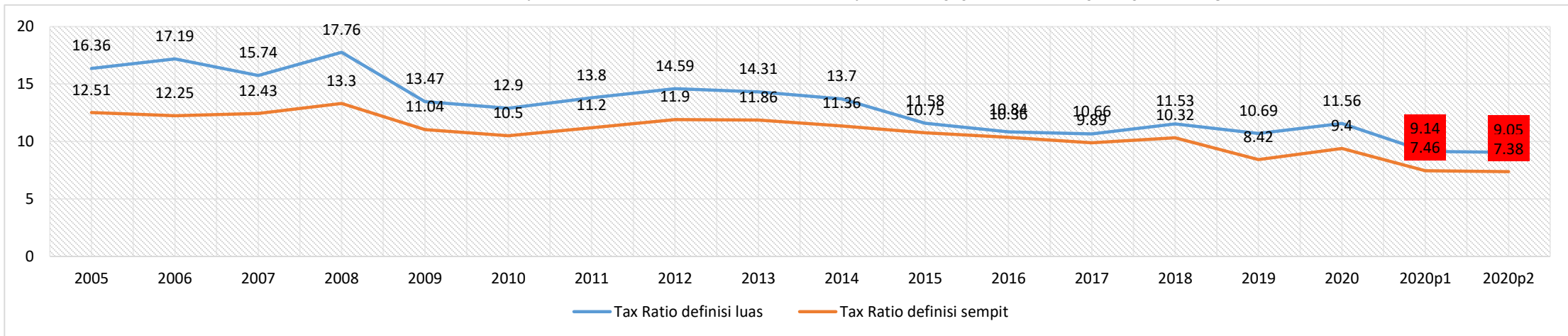
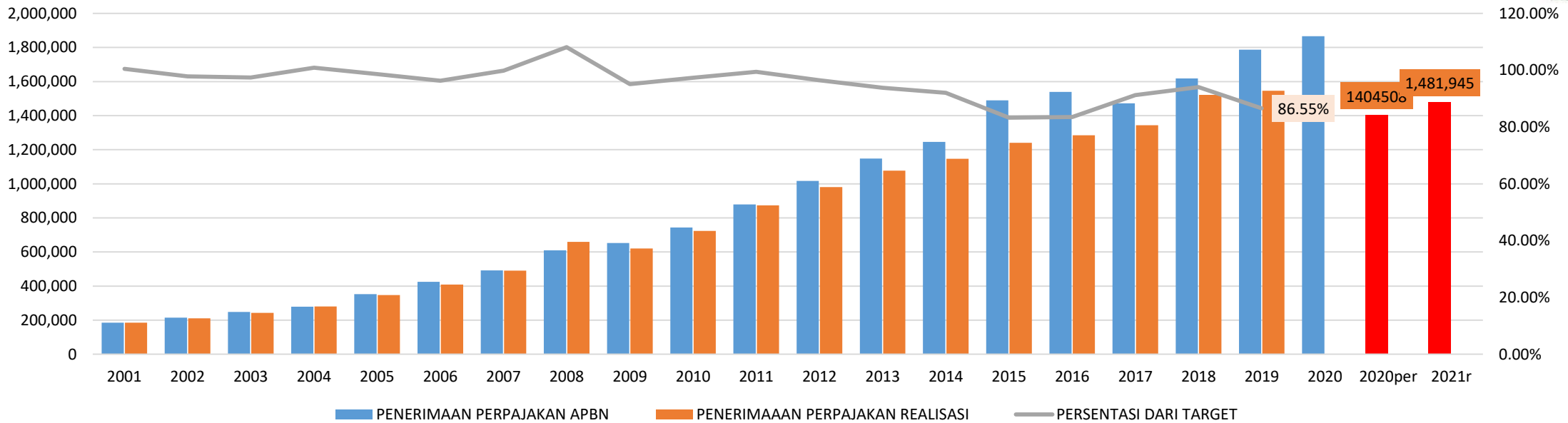
KESEIMBANGAN PRIMER



Sumber data: Kemenkeu; 2020: APBN, Perpres 54, Perpres 72; 2021: RAPBN



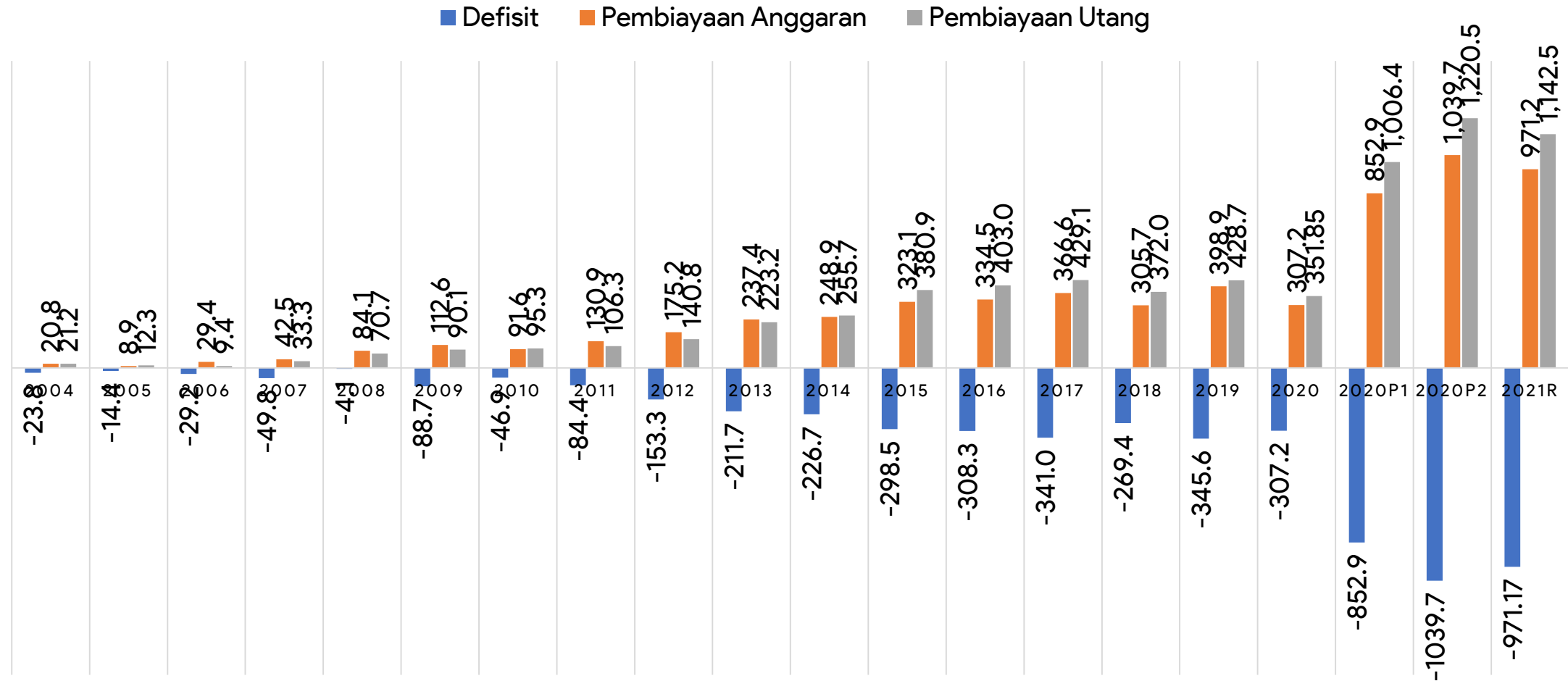
TENTANG TIDAK MANDIRI. Penerimaan perpajakan TIDAK mencapai target



Sumber data: Kementerian Keuangan; 2020: APBN, perpres no 54, perpres no 72; 2021: RAPBN



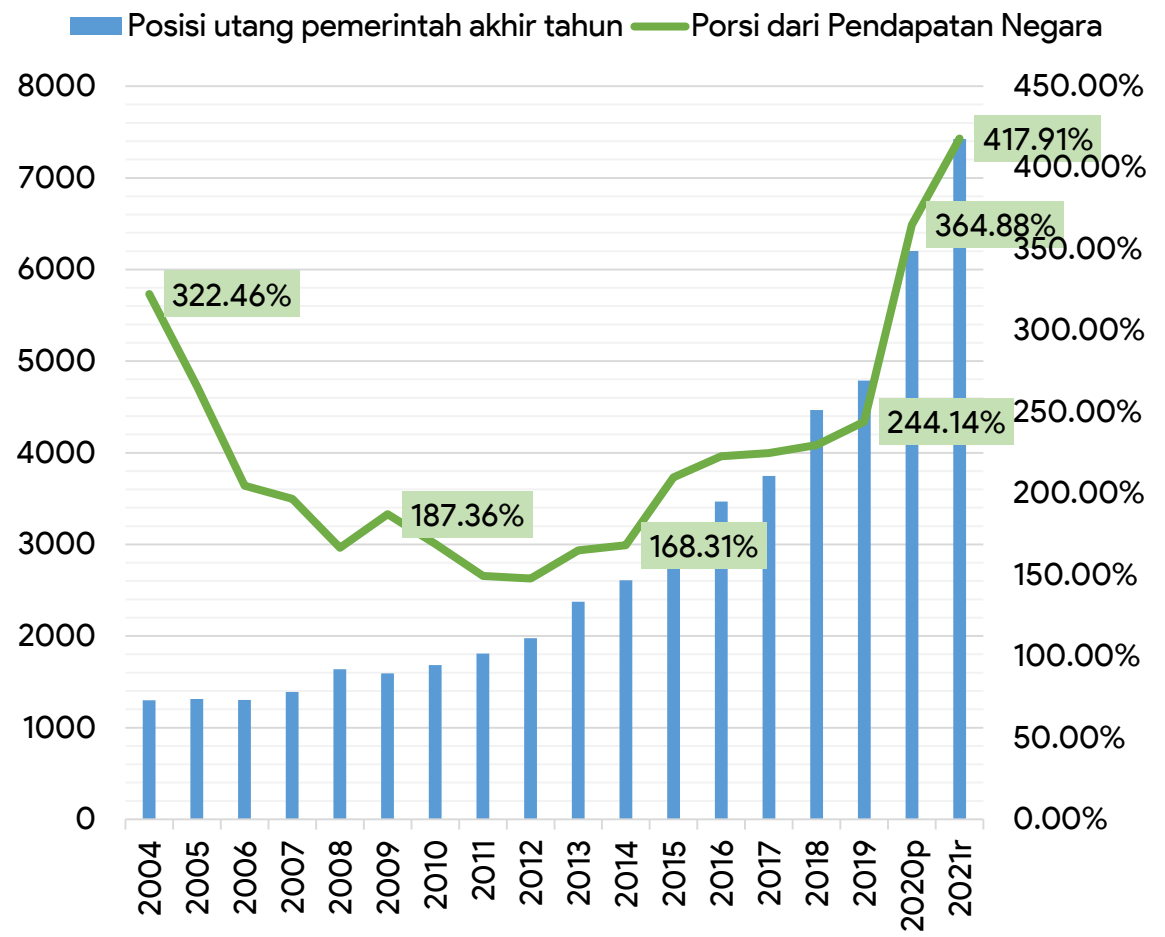
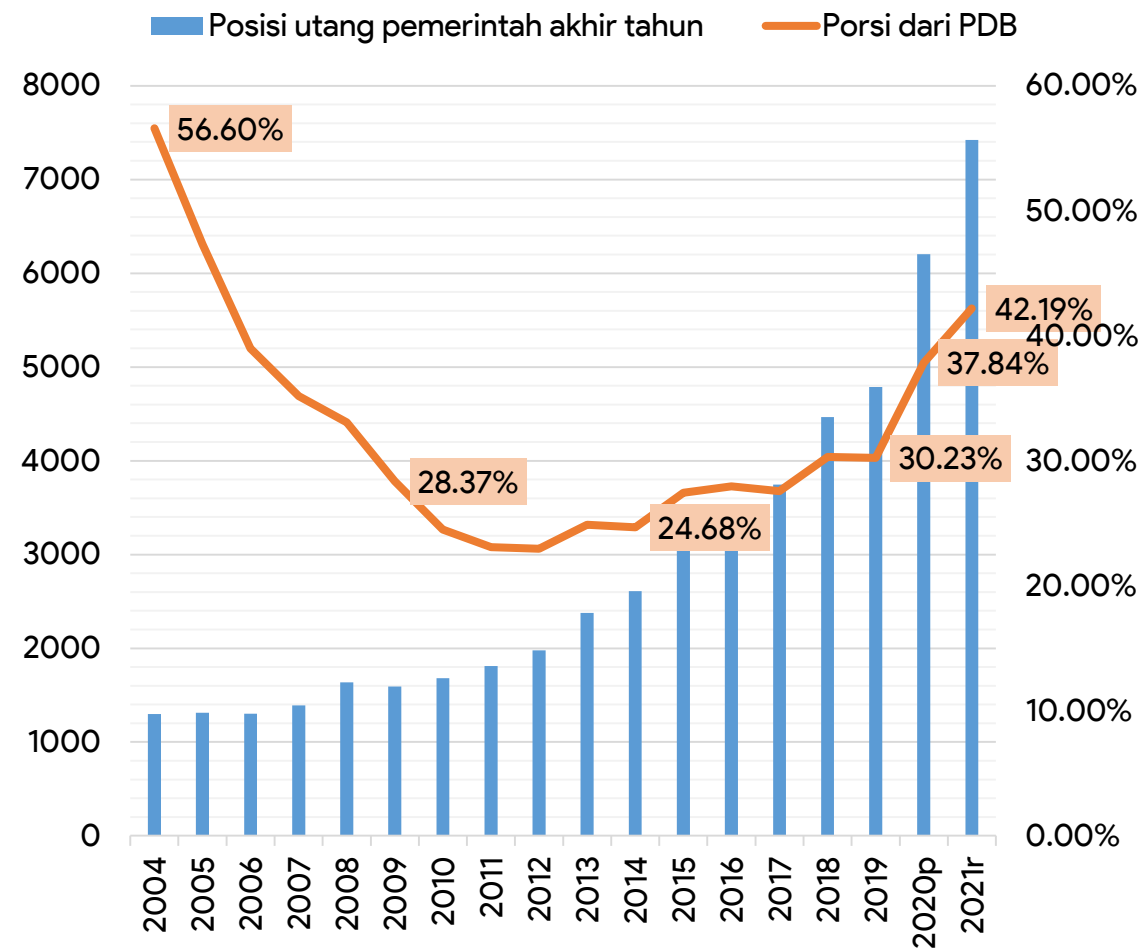
TENTANG TIDAK MANDIRI. Defisit dalam realisasi tidak sama dengan Pembiayaan Anggaran; PEMBIAYAAN UTANG (pembiayaan dengan menambah utang) meningkat



Sumber data: Kemenkeu; 2020: APBN, Perpres 54, Perpres 72

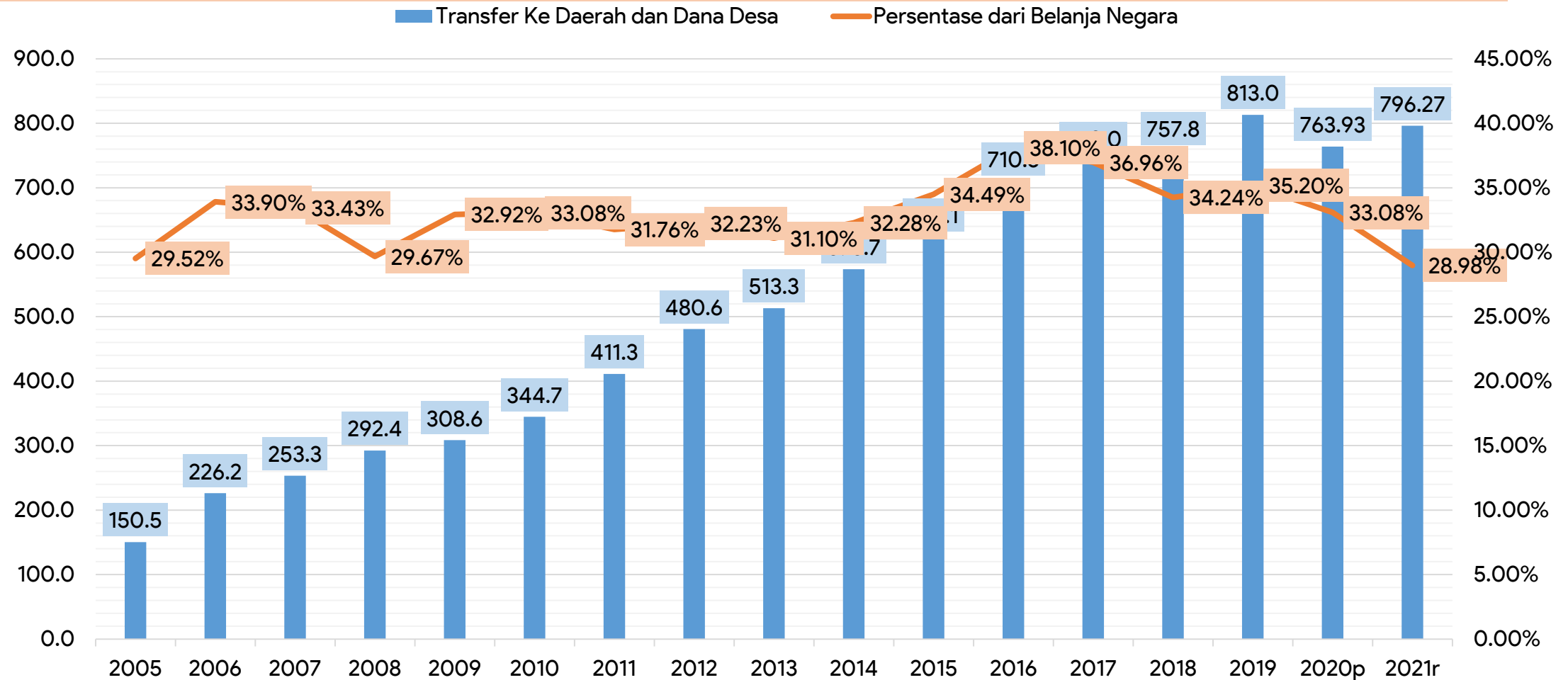


TENTANG TIDAK MANDIRI. Posisi Utang Pemerintah akan meningkat berdasar APBN 2020 (perpres 72) dan RAPBN 2021. Rasio atas PDB dan atas Pendapatan Negara naik



Sumber data: Kemenkeu. Realisasi 2004-2019, rasio diolah; 2020 (perpres 72) dan 2021 (RAPBN), diolah

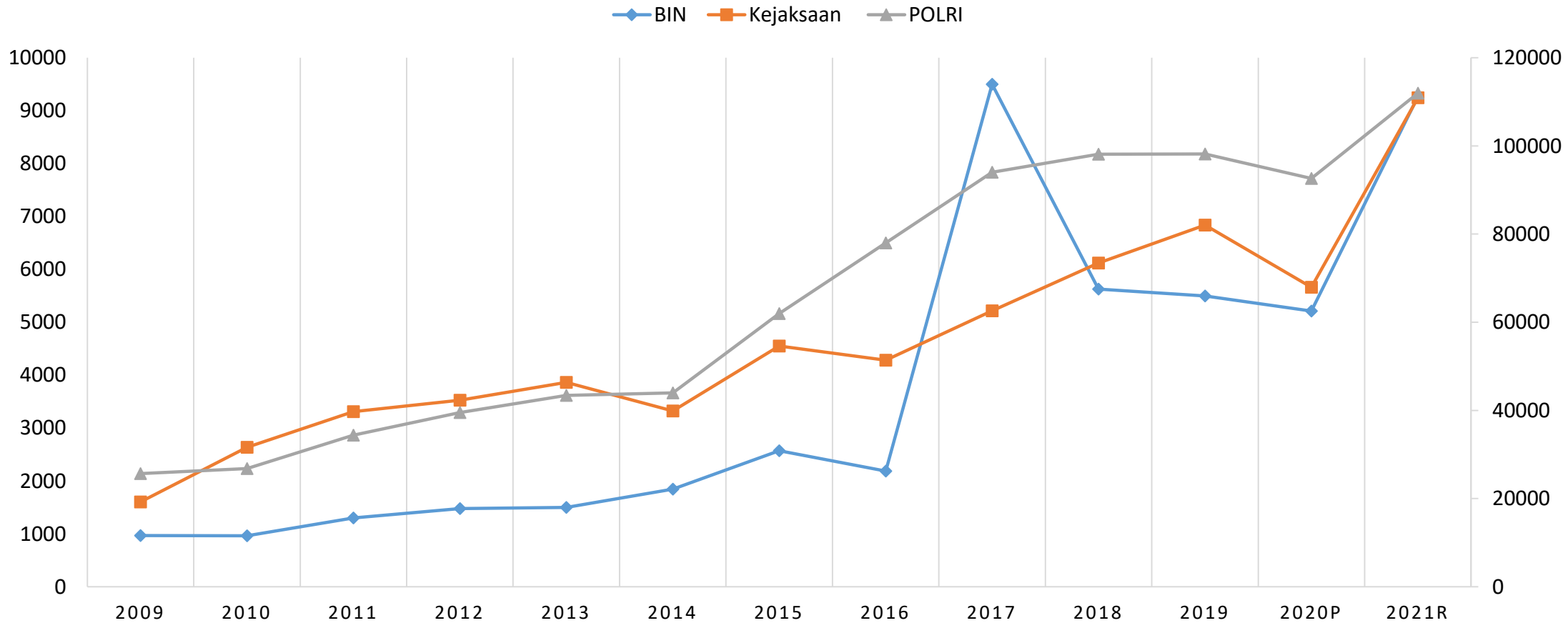
TENTANG INDIKASI KURANG ADIL. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA dalam RAPBN 2021 (Rp796,27 triliun). Porsinya cenderung turun dari total Belanja.



Sumber data: Kemenkeu, persentase diolah; 2020: perpres 72; 2021: RAPBN



INDIKASI KURANG ADIL. Alokasi belanja Kementerian/Lembaga RAPBN 2021 dibanding dengan realisasi APBN 2009 (11 tahun sebelumnya): POLRI (Rp111,98 T) naik 337%; Badan Intelejen Negara (Rp9,27 Triliun) naik 857%; Kejaksaan RI (Rp9,23 triliun) naik 477%. Kurun waktu yang sama, kenaikan Total Belanja (193%) dan kenaikan K/L (236%)



Sumber data: Kemenkeu; 2020: APBN, Perpres 54, Perpres 72

TENTANG INDIKASI KURANG ADIL. Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan berdasarkan fungsi menjadi 11 fungsi. RAPBN 2021 dibandingkan APBN perpres 72/2020: Fungsi Kesehatan, Fungsi Pendidikan dan Fungsi Ekonomi tumbuh signifikan dan meningkatkan porsinya. **NAMUN**, Fungsi Pertahanan dan fungsi Ketertiban dan Keamanan naik pesat.

FUNGSI	2020		2021		Perubahan 2020-2021
	Perpres 72	Porsi	RAPBN	Porsi	
PELAYANAN UMUM *)	757980,3	38,37%	527659,9	27,04%	-30,39%
PERTAHANAN	117957,5	5,97%	137040,8	7,02%	16,18%
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	141275,9	7,15%	165882,2	8,50%	17,42%
EKONOMI	435969,2	22,07%	492443	25,24%	12,95%
LINGKUNGAN HIDUP	13911,5	0,70%	16736,5	0,86%	20,31%
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	20648,7	1,05%	33228,5	1,70%	60,92%
KESEHATAN	81621,1	4,13%	111666,7	5,72%	36,81%
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF **)	3062,8	0,16%	5479	0,28%	78,89%
AGAMA	9679,8	0,49%	11075,9	0,57%	14,42%
PENDIDIKAN	142433,5	7,21%	190022,4	9,74%	33,41%
PERLINDUNGAN SOSIAL	250699,9	12,69%	260025,5	13,33%	3,72%
JUMLAH	1975240,2	100,00%	1951260	100,00%	-1,21%

Sumber data: Kementerian Keuangan, angka porsi dan pertumbuhan diolah



TENTANG TIDAK AMAN. Hasil Reviu atas Kestinambungan Fiskal dari BPK: Pemerintah telah menyusun analisis kestinambungan fiskal jangka panjang yang menimbang skenario-skenario yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

- Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang yang disusun Pemerintah perlu disempurnakan sebagaimana direkomendasikan International Public Sector Accounting Standard Board IPSASB pada Recommended Practice Guide (RPG);
- Pemerintah belum membuat Debt Sustainability Analysis (DSA) yang diantaranya memperhitungkan risiko atas kewajiban kontinjensi;
- Pemerintah belum menyajikan pengungkapan memadai terkait proyeksi kestinambungan fiskal pada LKPP secara khusus.
- Pemerintah tidak dapat mencapai target Tahun 2019 atas rasio utang terhadap PDB di bawah 30%, rasio defisit terhadap PDB di bawah 1%, dan primary balance positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019, sehingga dapat menimbulkan risiko fiskal dalam jangka panjang.
- Terdapat beberapa indikator kerentanan utang yang telah melampaui batas praktik terbaik yang ditetapkan IMF dan International Debt Relief. Indikator tersebut antara lain rasio debt service terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan dan rasio utang terhadap penerimaan.

TENTANG TIDAK AMAN. Hasil reuiu BPK (gambar disalin dari LHP BPK)

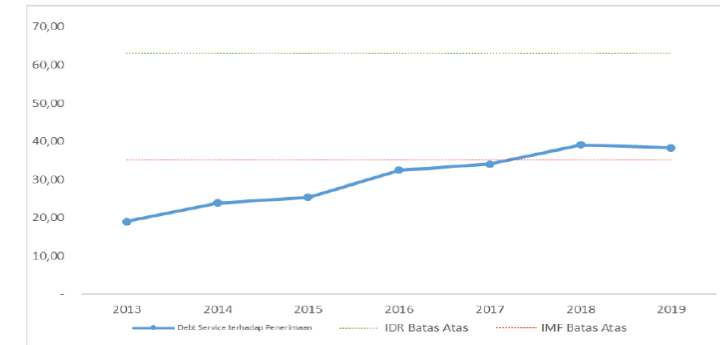


T NEGERI

Tabel 3 Realisasi Rasio Utang, Keseimbangan Primer dan Rasio Defisit 2015-2019

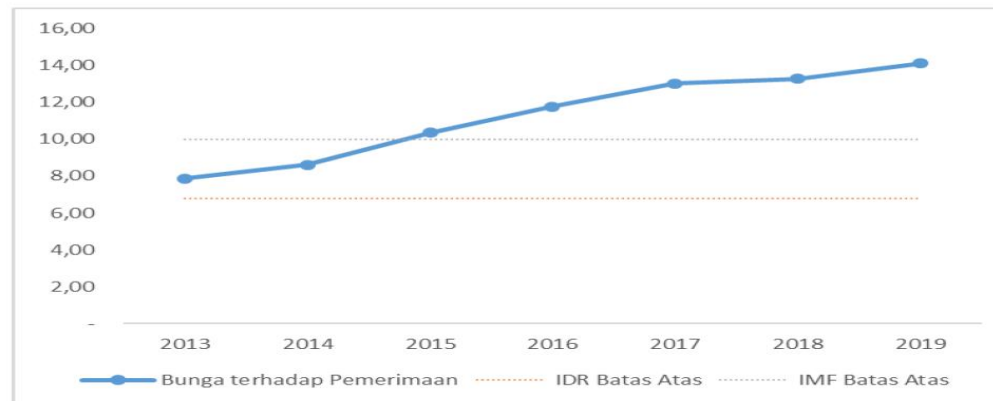
Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
PDB Nominal (Triliun)	11.531,72	12.406,81	13.588,80	14.837,40	15.834,00
Utang (Triliun)	3.165,13	3.466,96	3.746,17	4.466,20	4.786,59
Defisit (Triliun)	-298,49	-308,34	-340,98	-269,44	-348,65
Primary Balance (Triliun)	-142,49	-125,58	-124,41	-11,49	-73,13
Debt / GDP (%)	27,45	28,30	29,39	30,10	30,23
Defisit / GDP (%)	-2,59	-2,49	-2,51	-1,82	-2,20
Primary balance / GDP (%)	-1,24	-1,01	-0,89	-0,08	-0,46

1) Rasio *Debt service* terhadap Penerimaan



Gambar 8 Tren Rasio *Debt Service* terhadap Penerimaan

2) Rasio Pembayaran Bunga terhadap Penerimaan



Gambar 9 Tren Rasio Pembayaran Bunga terhadap Penerimaan

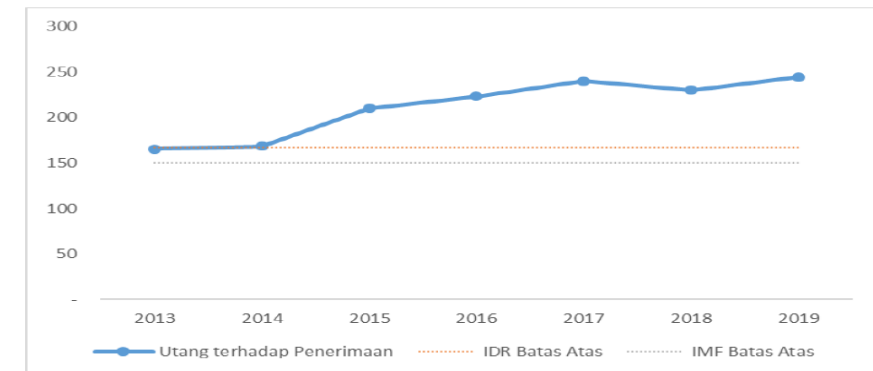
Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
Bunga/ Penerimaan (%)	7,86	8,61	10,35	11,75	13,00	13,27	14,10	4,6-6,8	7-10

* IDR = International Debt Relief, **IMF = International Monetary Fund
Data diolah dari LKPP

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
Debt service / Penerimaan (%)	18,99	23,88	25,35	32,48	34,01	39,06	38,31	28-63	25-35

* IDR = International Debt Relief, **IMF = International Monetary Fund

3) Rasio Utang terhadap Penerimaan



Gambar 10 Tren Rasio Utang terhadap Penerimaan

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	IDR*	IMF**
Utang terhadap Penerimaan (%)	165,09	168,25	209,89	225,66	239,70	227,55	244,31	92-167	90-150

* IDR = International Debt Relief, **IMF = International Monetary Fund
Data diolah dari LKPP



PENUTUP

- Jika sakit, bergantung utang, kurang adil dan berisiko besar, maka rekomendasinya diobati dan diperbaiki.
- APBN 2020 dan RAPBN 2021 perlu perubahan sangat mendasar, tidak bisa dikelola seperti biasanya
- Yang paling bisa segera dilakukan adalah **PENGURANGAN BELANJA**
- APBN defisit bersifat ekspansif lebih bersifat asumsi. Sebenarnya bergantung belanja seperti apa
- Belanja yang perlu ditingkatkan adalah yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat
- Cara pembiayaan APBN perlu perubahan mendasar.